

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Amerika Serikat (AS) dengan Israel memiliki hubungan yang erat sejak lama, bahkan secara historis. AS menjadi negara yang selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Israel. Kaum Yahudi memiliki peranan yang sangat besar bagi pertumbuhan Amerika Serikat. Konsep kapitalisme yang disebarkan oleh AS merupakan salah satu produk Yahudi yang bertujuan untuk menciptakan kekuatan ekonomi yang kuat. Yahudi juga banyak menguasai sektor industri AS. Keterlibatan Yahudi juga masuk dalam ranah politik, yang dikenal dengan sebutan lobi Yahudi. Salah satu kelompok kepentingan Yahudi yang memiliki pengaruh terbesar dalam pemerintahan Amerika Serikat yaitu AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*). AIPAC dibentuk pada tahun 1951 pada masa pemerintahan Presiden Eisenhower. AIPAC memusatkan kepentingannya kepada negara Israel agar setiap kebijakan Amerika Serikat tidak bertentangan dengan kepentingan negara Israel sebagai negara sekutu Amerika Serikat. AIPAC mampu mempengaruhi anggota Kongres dan para Senator, juga berperan dalam pemilihan umum. Anggota AIPAC adalah para pelobi yang terdiri dari politisi dan tokoh Yahudi untuk memperkuat hubungan antara AS dan Israel, termasuk dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan pemerintah Tel Aviv.

Donald John Trump merupakan Presiden Amerika Serikat ke-45 yang dikenal penuh kontroversi. Dalam janji kampanye, Trump sudah membuat pernyataan dukungan kepada pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibukota Israel “yang tak terbagi”. Hal tersebut diwujudkan Trump saat menjadi Presiden secara resmi. Hingga akhirnya pada Mei 2018 sudah resmi dipindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem bertepatan dengan hari jadi negara Israel.

Kongres menerbitkan undang-undang Kedutaan Yerusalem (*Jerusalem Embassy Act*) pada tahun 1995 yang isinya memerintahkan pemerintahan Amerika Serikat untuk memindahkan kantor Kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem sebelum tahun 1999. Namun pemindahan tersebut tertunda dari masa ke masa kepemimpinan. Para presiden menandatangani dokumen penundaan tersebut setiap 6 bulan sekali sejak undang-undang ini resmi diterbitkan. Pemindahan kedutaan tersebut sebagai salah satu bentuk AS dalam mengakui kedaulatan Israel.

Setelah 22 tahun undang-undang tersebut diterbitkan, bagi Trump ini adalah saatnya AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota dari Israel. Pengakuan tersebut sebagai bentuk kepentingan terbaik AS dan pengejaran perdamaian antara Israel dengan Palestina. Pada tahun 2017 Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) H.R.257 – *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*, 115<sup>th</sup> Congress (2017-2018). RUU ini disponsori oleh Representatif Trent Franks dari pantai Republikan. Bill ini dikeluarkan dalam komite Luar Negeri. Dalam keterangannya dijelaskan RUU ini sudah diperkenalkan pada 1 April 2017 yang menjelaskan tentang kebijakan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi.

Presiden Donald Trump melakukan penundaan karena ingin merundingkan terlebih dahulu kesepakatan antara Israel dan Palestina, demi keamanan nasional Amerika Serikat. AIPAC melakukan pendekatan kepada lembaga penting di pemerintahan AS yang diantaranya eksekutif dan legislative. AIPAC selalu berupaya agar kebijakan AS tidak jauh dari kepentingan yang mendukung Israel di dalamnya. Melalui lobi, AIPAC berhasil memengaruhi pemerintahan AS untuk memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, Yerusalem merupakan kota yang memiliki kedudukan penting bagi Israel, baik dari segi kebudayaan

maupun segi politik. Lobi AIPAC bias mudah dilakukan karena banyak pejabat yang berhutang budi pada AIPAC karena membantu mereka untuk sokongan dana ketika kampanye, terkhusus para pejabat yang secara terang-terangan mendukung kedaulatan Israel.

AIPAC melakukan lobi dari tahapan politikus eksekutif dengan Konferensi Tahunan AIPAC. Badan legislative yaitu Kongres AS menjadi incaran lobi. Hubungan antara Kongres dengan AIPAC berlangsung semenjak anggota kongres menjadi kandidat, baik dari Partai Democrat maupun Republic. AIPAC mengadakan pertemuan pada setiap kandidat yang ingin mencalonkan jadi anggota kongres. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang para calon kandidat anggota kongres pada sikap mereka terhadap Israel. Hingga saat kongres sudah berjalan, para anggota tersebut akan mendukung rancangan undang-undang yang merujuk pada kepentingan Israel. AIPAC berhasil memengaruhi kongres untuk rencana pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem. Pada tahun 2017 Kongres Amerika Serikat memberikan reaksi terhadap lobi AIPAC yaitu berupa mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) H.R.257 – *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*, 115<sup>th</sup> Congress (2017-2018) dan juga Senat AS mengajukan RUU S.11 - *Jerusalem Embassy and Recognition Act*.

AIPAC mengontrol media melalui tekanan pada media tersebut. Penekanan ini dilakukan pada media yang dimiliki oleh Amerika keturunan yahudi maupun non-Yahudi dengan cara memberikan gelar antisemit pada media yang melanggar ketentuan yang ada. Disamping itu, AIPAC memiliki lembaga pengawas pemberitaan media massa AS yang bernama Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA). Lembaga tersebut akan mengirimkan teguran kepada pimpinan media massa yang memojokkan Yahudi dan mengkritik kebijakan AS terhadap Israel berupa surat elektronik. AIPAC memiliki media massa

yang bernama *Near East Report*. Pengadaan media massa ini dibiayai oleh The American Israel Education Foundation (AIEF), yaitu sebuah lembaga amal yang berfiliasi dengan AIPAC. Artikel dari *Near East Report* terbit setiap sebulan sekali. Para politikus di Washington yang pro-Israel memiliki dukungan akan pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.